



PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN BUMDES BERKELANJUTAN UNTUK AKSELERASI BUMDES MANDIRI**Oleh****Muhammad Faisal Riza¹, Irfan Kharisma Putra², Dewi Noor Fatikhah Rokhimakhumullah³, Fiaz Muthia Firlianna⁴**^{1,2,3,4}Universitas BrawijayaEmail: [1faisalriza@gmail.com](mailto:faisalriza@gmail.com)

Article History:

Received: 03-11-20201

Revised: 11-12-2021

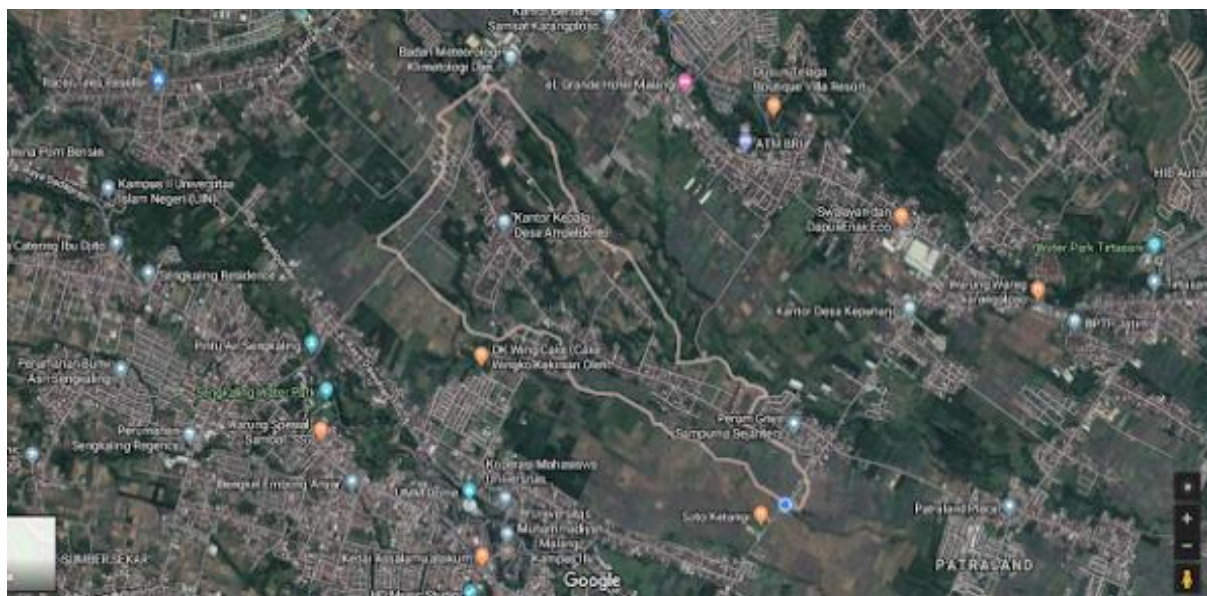
Accepted: 24-12-2021

Keywords:*Business Processes, HR Management, Accounting, Bumdes*

Abstract: *the community service program is packaged in the form of a Sustainable BUMDes Training and Assistance package for the Acceleration of Independent BUMDes. The training and mentoring are carried out starting from the business management aspect of BUMDes, Human Resources (HR) management which of course acts as the direct manager of BUMDes, and financial aspects including taxation. The purpose of this activity is to help improve the governance of BUMDes, together with the village government, the community, and the private sector; through training and mentoring efforts to explore the natural potential and the potential of human resources owned. The method used is divided into three stages, namely 1) analyzing the mapping of the problems faced by BUMDes in Ampeldento Village, 2) conducting socialization about the steps for establishing BUMDes in accordance with regulations, 3) providing training and assistance in business development through exploring potential resources. owned village people and trained in making simple financial reports. The service program carried out has had a good impact on the development of BUMDes and related human resources so that BUMDes is expected to be sustainable so that it can provide benefits to the community in a sustainable manner.*

PENDAHULUAN

BUMDes Kusuma Ample Dento terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Ampeldento terletak di perbatasan antara Kota Wisata Batu dengan Kabupaten Malang. Secara geografis desa Ampeldento terletak pada posisi 7° 21' sampai 7° 31' LS dan 110° 10' sampai 111° 40' BT dengan ketinggian ± 615 meter diatas permukaan air laut. Jarak tempuh desa Ampeldento ke ibukota kecamatan adalah 5 km dan ke ibukota kabupaten 21 km (ampeldento-desa.blogspot.com).



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Ampeldento

Luas wilayah desa Ampeldento $\pm 171,3.98$ ha. Luas lahan tersebut dikelompokkan untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya, 31 ha luas lahan diperuntukkan untuk pemukiman, 136 ha untuk pertanian, 0.0198 ha untuk perkantoran, 0.35 ha untuk sekolah, 0.59 ha untuk pemakaman umum (ampeldento-desa.blogspot.com). Wilayah desa Ampeldento secara umum berupa lahan tanah hitam yang cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Desa ampeldento terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Bunder, Dusun Jumput, Dusun Kasin Putuk, dan Dusun Kasin Krajan. Desa Ampeldento kaya dengan sumber mata air, persawahan dan ladang. Di desa ini ada sekitar 8 sumber mata air. Dan beberapa dari sumber mata air tersebut merupakan situs bersejarah bagi masyarakat setempat. Desa ampeldento juga mempunyai dan melestarikan kesenian budaya jawa yaitu kesenian pencak silat dan kuda lumping. Pemerintahan desa ampeldento mulai berdiri sejak tahun 1939, saat ini dipimpin oleh Kepala Desa, Bapak Hariyanto (2019-2024).

Kekayaan alam yang dimiliki Desa Ampeldento belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pada tahun 2020 di salah satu lahan pertanian milik warga dibangun sebuah warung makan, yakni NK Café. Warung makan ini merupakan milik pribadi dan dikelola secara mandiri. Setelah melihat peluang bisnis dari warung makan ini yang relatif cepat berkembang, maka pemilik warung makan menginisiasi kerjasama dengan pemerintah Desa Ampeldento untuk pemanfaatan Lahan Tanah Kas Desa (TKD) yang semula hanya merupakan lahan pertanian biasa, akan dikembangkan agar memiliki nilai tambah, dengan dibangun *jogging track*. Hal ini akan menambah daya tarik pengunjung untuk datang ke Desa Ampeldento, karena menawarkan konsep kuliner dan menyatu dengan alam, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan kas desa.

Bagi hasil dengan NK Café atas persewaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan pengelola BUMDes. Setiap bulannya, NK Café menyetorkan kas bagi hasil Kepada BUMDes Kusuma Ampeldento agar dikelola dengan baik, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi desa dan masyarakat sekitar. Namun, pengelolaan bisnis, sumber daya, dan keuangan BUMDes Ampeldento belum terlaksana dengan baik. Hal ini diketahui pada akhir Desember 2020,



terjadi permasalahan yang muncul antara pemerintah desa Ampeldento dengan masyarakat, dimana masyarakat menganggap belum adanya transparansi atas penghasilan yang dihasilkan dari persewaan Tanah Kas Desa (TKD) kepada NK Café oleh pemerintah desa setempat. Hal ini dikarenakan permasalahan yang umum dihadapi oleh BUMDes terkait kurangnya pengembangan kapasitas manajerial BUMDes, pengelolaan sumber daya manusia yang kurang, dan juga masalah transparansi usaha BUMDes yang dijalankan (Anggraeni, 2016).



Gambar 2. NK Café dan Tanah Kas

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes Kusuma Ample Dento belum memenuhi prinsip tata kelola yang baik. Fungsi BUMDes masih belum berjalan dengan baik, karena BUMDes belum bisa mengoptimalkan potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia masyarakat desa untuk mengembangkan bisnis BUMDes. Program pengabdian ini akan membantu pembenahan tata kelola BUMDes, bersama pemerintah desa, masyarakat, dan swasta; melalui pelatihan dan pendampingan upaya penggalan potensi alam dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki.

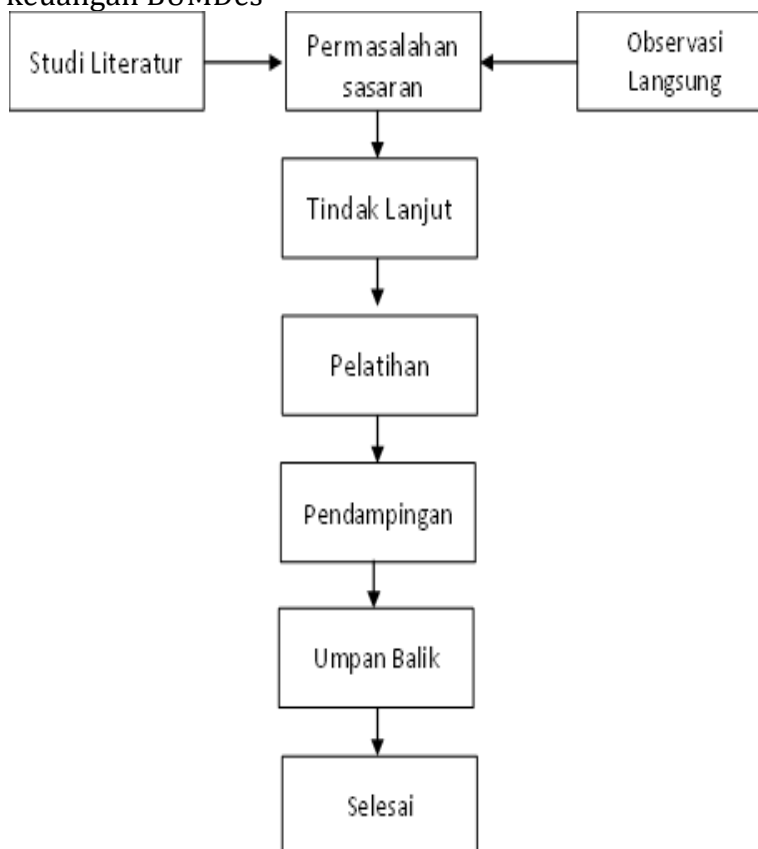
Program pengabdian kepada masyarakat dikemas dalam bentuk paket Pelatihan dan Pendampingan BUMDes Berkelanjutan untuk Akselerasi BUMDes Mandiri. Pelatihan dan pendampingan dilakukan mulai dari aspek manajemen pengelolaan bisnis BUMDes, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang tentunya bertindak sebagai pengelola langsung BUMDes, dan aspek keuangan termasuk perpajakan. UU Cipta Kerja Tahun 2020, mengharuskan BUMDes harus berbentuk badan hukum, sedangkan pengelolaan dan pelaksanaan didasarkan pada PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi menjadi beberapa tahapan, sebagai berikut:



1. Melakukan analisis pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Desa Ampeldento, Kab. Malang dengan pemangku kepentingan di tingkat desa dan juga internal BUMDes, hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dan permasalahan mana yang memang harus segera diselesaikan dan bisa mempercepat BUMDes Mandiri ke depannya.
2. Memberikan arahan kepada internal BUMDes dan juga Pemerintah Desa dengan langkah-langkah pembentukan BUMDes yang sesuai itu seperti apa, dan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut:
 - a. Mereview AD ART BUMDes
 - b. Pendampingan TIM internal BUMDES
 - c. Rapat bersama melalui MUSDES
 - d. Persiapan Pelaksanaan MUSDES
 - e. Sosialisasi Pemetaan Potensi yang dapat dikembangkan dan Pemilihan Usaha pada Masyarakat
3. Memberikan pelatihan terkait pengembangan bisnis melalui penggalian potensi sumber daya manusia masyarakat desa yang dimiliki oleh Desa Ampeldento dan pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana
4. Memberikan pendampingan dalam bidang:
 - a. Pendampingan tentang Proses Bisnis BUMDes
 - b. Pendampingan Manajemen SDM BUMDes
 - c. Pendampingan keuangan BUMDes



Gambar 3. Kerangka Pengabdian Kepada Masyarakat



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober 2021, yang mundur dari rencana awal, yaitu Bulan Agustus 2021. Hal ini dikarenakan adanya program PPKM yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Program pengabdian ini masih dalam tahap pelatihan, sehingga masih ada tahap pendampingan yang akan dilaksanakan pada akhir Bulan Oktober sampai dengan Bulan November 2021.

Pelatihan yang dilakukan terdiri atas pelatihan proses bisnis BUMDes, strategi pengelolaan SDM BUMDes, dan pelaporan keuangan dan perpajakan. Pelatihan dilaksanakan di Café NK yang menjadi salah satu 'penggerak' bagi BUMDes Kusuma Ampel Dento dalam hal pengelolaan pembagaian TKD (Tanah Kas Desa). BUMDes Kusuma Ampel Dento berdiri sejak tiga tahun yang lalu dan memiliki tiga unit bisnis, yaitu simpan pinjam, peternakan, dan telekomunikasi (jaringan wifi desa). BUMDes Kusuma Ampel Dento tergolong BUMDes berkembang, dimana proses pengelolaan sumber daya dan keuangannya masih belum stabil.

Proses bisnis BUMDes diarahkan untuk menjadi BUMDes yang mandiri, mampu mengelola bisnis dengan baik dan mampu menghasilkan PADes. Tiga unit bisnis sudah berjalan, namun BUMDes masih belum mampu mengembangkan bisnisnya tersebut. Ditambah permasalahan TKD yang juga belum diselesaikan. Kegiatan tahap pertama ini dimulai dengan pelatihan tentang proses bisnis yang dapat dilakukan oleh BUMDes supaya kegiatan bisnisnya dapat berkembang. Menurut UU Cipta Kerja yang diturunkan menjadi PP No 11/2021, bahwa BUMDes diharapkan dapat berbentuk badan usaha. Sehingga segala proses administrasi dan pengelolaan dan pelaporan usahanya disamakan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya.

Materi pelatihan kedua tentang pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh BUMDes, karena sumber daya manusia salah satu hal pokok yang dapat mempercepat perkembangan BUMDes. Sumber daya manusia pengelola BUMDes diharapkan memiliki kapabilitas untuk mengelola dibebberapa aspek BUMDes. Sumber daya manusia yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes merupakan warga desa ampel dento, sehingga fungsi BUMDes sebagai sarana untuk membentuk kemandirian desa dapat tercapai. Pelatihan karyawan juga perlu dilakukan untuk mengasah ketrampilan pegawai BUMDes, sehingga BUMDes dapat dijalankan oleh sumber daya manusia yang memang berkompeten dibidangnya.

Materi pelatihan ketiga yaitu aspek pelaporan keuangan dan perpajakan. Sesuai dengan PP No 11/2021, pengelolaan dan pelaporan BUMDes disamakan dengan kegiatan usaha seperti biasa. Sehingga pelaporan akuntansi dan perpajakannya juga disesuaikan dengan pelaporan pada umumnya. Laporan keuangan menggunakan standar akuntansi untuk UMKM dan perpajakan menggunakan skema perpajakan PP 23 tahun 2018.

Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi kelompok terfokus (FGD) ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang lebih dalam tentang konsep, persepsi, dan ide-ide pengembangan komoditas lokal berdaya saing dengan peserta berjumlah 10-15 orang dari beberapa perwakilan masyarakat dan Pemerintah Desa. Dalam konteks kegiatan FGD pengembangan komoditas lokal ini akan mengangkat tema dan topik terdiri atas beberapa poin penting, yaitu: filosofis pemberdayaan masyarakat, penggalian potensi kerjasama stakeholders kunci penggalian pengembangan potensi SDM, penggalian pengembangan potensi komoditas lokal, tatanan kelembagaan, dan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kunci utama penentuan komoditas lokal



unggulan adalah aspek kriteria yang digunakan dalam skala pengukuran potensi komoditas lokal. Kriteria ini akan memberikan pemetaan komoditas lokal terbaik menurut narasumber terpercaya baik berasal dari tenaga ahli, masyarakat, maupun stakeholders lain terkait.

Tujuan Pendirian BUMDes Kusuma Ample Dento

Tujuan mendirikan BUMDES adalah mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat dan pemberian pelayanan, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

Pendirian BUMDes Kusuma Ampel Dento bertujuan sebagai berikut:

1. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat;
2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat;
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal;
4. Memberikan pelayanan kebutuhan air bersih;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa serta membuka lapangan pekerjaan.

B. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUMDes

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes Kusuma Ampel Dento diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes Kusuma Ampel Dento untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas, dan membuka peluang usaha ekonomi produktif masyarakat yang memiliki modal usaha kurang. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif.

Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan intervensi Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan, perumus dan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. memberi fasilitas dan sebagai mediator bagi masyarakat. Berikut adalah Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDes Kusuma Ampel Dento:

1. Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa mendukung dan membantu memberikan fasilitas kepada BUMDes. Fasilitator di sini memiliki arti mengembangkan pembentukan BUMDes dan mendorong BUMDes agar mampu menjalankan fungsinya sebagai penyangga ekonomi masyarakat desa. Karena BUMDes diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap taraf hidup warga desa (masyarakat) sehingga berimplikasi terhadap adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa mengeluarkan kebijakan tentang prasyarat menjadi pengurus BUMDes Kusuma Ampel Dento supaya dipegang dan dikelola dengan baik dan di tangan yang benar. Selain itu, Pemerintah Desa berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dengan berbagai macam pelatihan dan workshop kepada pengurus. Selain memberikan pelatihan dan workshop, pemerintah desa juga memberikan motivasi sehingga pengurus lebih semangat dan lebih profesional.



2. Pemerintah Desa juga memberikan asistensi (melakukan pendampingan), *mentoring* dan *coaching* terhadap kinerja Pengurus BUMDes terhadap proses-proses pengelolaan usaha dan manajemen keuangan.
3. Pemerintah Desa mendorong dan memfasilitasi proses refleksi dan persiapan pada setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMDes. Penganggaran melalui Dana Hibah juga diperuntukkan sebagai tambahan modal. BUMDes sebagai lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
4. Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat adanya BUMDes.
5. Pemerintah Desa mendorong BUMDes untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes, termasuk dalam pengelolaan aset, serta penganekaragaman usaha yang dimiliki.

C. Faktor Pendukung Keberhasilan BUMDes

1. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan sebuah program dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dibutuhkan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah program. Antara lain sumber daya finansial, sumber daya alam, dan potensi-potensi lain yang dapat mendukung berhasilnya sebuah program. Begitu pula dalam pelaksanaan BUMDes Kusuma Ampel Dento sumber daya-sumber daya tersebut sangat berpengaruh. Hal yang pertama sumber daya manusia, dalam proses pelaksanaan BUMDes, tidak hanya unsur Pemerintah Desa dan pengurus saja yang berperan. Akan tetapi masyarakat pun ikut berperan aktif terutama melalui berbagai kelompok kegiatan yang ada di desa seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok pkk, kelompok peternak dan lain lain. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa yang paling berperan adalah para pengurus BUMDes yang dipilih melalui musyawarah desa. Hal yang kedua adalah sumber daya finansial, dalam pelaksanaan program BUMDes dibutuhkan modal yang sangat besar. Modal ini berasal dari APBDes yang kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan BUMDes. Dengan adanya perkembangan BUMDes menuju ke arah yang baik dan cukup signifikan sehingga Desa menjadi lebih dikenal. Selain sumber daya manusia dan finansial, hal yang ketiga adalah sumber daya alam dan potensi-potensi desa lainnya yang perannya tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja.

2. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa guna kelancaran dalam proses pembangunan serta adanya ketepatan sasaran tujuan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes. Perencanaan dan pembentukannya merupakan prakarsa masyarakat atas intervensi dari Pemerintah Desa. intervensi disini adalah adanya perlindungan hukum yang mengatur mengenai BUMDes melalui Perdes dan pengawasan kegiatan BUMDes. Selebihnya, Pemerintah Desa berperan dalam pendanaan melalui APBDes dan melihat potensi desa apa yang bisa dikembangkan melalui BUMDes. Dalam



prosesnya dari awal hingga saat ini, BUMDes Kusuma Ampel Dentot idak hanya mementingkan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes Kusuma Ampel Dento tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk meningkatkan ketrampilan mereka dangan menjadi pengurus BUMDes. Masyarakat yang sebelumnya menganggur dan tidak ada penghasilan tambahan bisa menjadi karyawan di unit-unit usaha ataupun bergabung dengan kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes tersebut.

3. Dukungan Pemerintah

Pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes, desa tidak dapat berjalan sendirian tanpa adanya bantuan dan dukungan terutama dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan BUMDes Kusuma Ampel Dento adalah dukungan yang sangat besar dari Pemkab Malang maupun Pemprov Jatim. Bantuan dan dukungan yang dimaksud adalah bantuan dana yang diperuntukan dalam pengembangan BUMDes dan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas pengelola BUMDes. Tentunya, bantuan dan dukungan dari pemerintah akan meningkatkan produktifitas dan efektifitas pengelolaan BUMDes.

4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Tidak hanya bantuan dari pemerintah daerah saja yang membantu dalam pengembangan unit usaha BUMDes. Bantuan dan kerjasama bisa dilakukan dengan pihak ketiga. Selama ini, BUMDes Kusuma Ampel Dento sudah bekerjasama dengan beberapa lembag. Dengan adanya kerjasama inipastinya para pekerja akan bekerja secara lebih maksimal dan bersemangat.

D. Faktor Penghambat Pengembangan BUMDes

Walaupun dikatakan berjalan dengan baik bukan berarti pengelolaan BUMDes Kusuma Ampel Dento tanpa hambatan. Hambatan dalam mendirikan BUMDes yang paling utama adalah masalah penggajian. Beberapa BUMDes yang sudah mempunyai usaha yang eksis dan pendapatan yang masuk tiap bulannya, akan tetapi belum bisa untuk memenuhi gaji karyawan dan direksi BUMDes. Hal ini pulalah yang menyebabkan banyak desa tidak mempunyai BUMDes karena susahnya mencari pengurus yang mau bekerja secara sukarela. Tidak ada regulasi yang mengatur penggajian pengurus dan karyawan BUMDes. Masalah penggajian ini sebenarnya tidak terlalu menghambat perkembangan BUMDes Kusuma Ampel Dento. Selama kurang lebih satu setengah tahun berjalan, para pengurus belum pernah menerima gaji. Akan tetapi jika ada gaji yang diterima para pengurus pastinya kinerja dan semangat mereka akan lebih tinggi. Faktor selanjutnya adalah belum optimalnya peran website desa dalam promosi dan pelayanan masyarakat. Padahal jika lebih dikelola dengan baik lagi, tentunya makin banyak wisatawan yang tertarik berkunjung ke Desa ini dan lebih memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dari BUMDes maupun dari Pemerintah Desa.

Permasalahan yang sering mengemuka adalah permasalahan perekrutan karyawan BUMDes. Warga merasa bahwa BUMDes tidak memberdayakan orang-orang sekitar. Di sisi lain, nampak adanya tuntutan profesionalisme dari warga kepada pengelola BUMDes. Kedua hal ini akan memunculkan dilema pada tata kelola BUMDes dimana BUMDes dituntut bekerja profesional, di sisi lain harus mengakomodasi tuntutan penyerapan tenaga kerja lokal, dimana SDM lokal memiliki kapasitas dan kapabilitas yang terbatas. Komunikasi dan sosialisasi



menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang tersosialisasi terkait kegiatan dan pelaporan kinerja yang dilakukan BUMDes. Hal ini menyebabkan munculnya tuntutan masyarakat pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, Pemerintah Desa seharusnya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait BUMDes supaya dapat memberikan kemudahan terhadap pengelola BUMDes dan masyarakat juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan BUMDes itu sendiri.

KESIMPULAN

Program pengabdian yang dilakukan telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan BUMDes dan sumber daya manusia yang terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi BUMDes Kusuma Ampel Dento. Kegiatan pelatihan terdiri atas pelatihan tentang proses bisnis, pengelolaan SDM, dan pelaporan keuangan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan BUMDes dan sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia pengelola BUMDes diharapkan memiliki kapabilitas untuk mengelola dibebberapa aspek BUMDes. Kegiatan ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas terkait dengan pengembangan BUMDes yang akan memberikan kontribusi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya dari pengelola BUMDes itu sendiri.

Sinergi antar masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam mempercepat akselerasi pertumbuhan BUMDes. Pertumbuhan BUMDes ini tentunya akan memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program pendampingan yang dilakukan terhadap BUMDes sangat membantu dalam pengembangan BUMDes dan unit usahanya. Pendampingan dan pelatihan dalam program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat supaya pengelolaan unit usahanya lebih tertata, sehingga mempermudah dalam pengembangan usaha. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pemeran kunci dalam pengembangan BUMDes harus mendukung dan ikut berkontribusi dalam pengembangan BUMDes dengan bekal pelatihan dan pendampingan oleh peneliti. Pertumbuhan BUMDes diharapkan dapat secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat secara berkelanjutan.

SARAN

BUMDes merupakan unit usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga segala kebijakan masih mengikuti kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah desa. Adapun saran yang dapat peneliti ajukan kepada pemerintah desa dan BUMDes, antara lain:

1. BUMDes diharapkan memiliki rencana bisnis yang strategis, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dimasyarakat,
2. Pemerintah desa diharapkan memiliki kebijakan secara tertulis mengenai prosedur perekrutan pengelola dan karyawan, sehingga dalam proses tersebut dapat berjalan secara transparan, dan
3. Akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Anggraeni, M. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. MODUS, 28 (2), 155–167. Diakses pada tanggal.
- [2] Harmiati, & Zuhakim, A. A. (2017). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3650/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021>. diakses tanggal 29 April 2021.
- [3] Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies. 7 (4): 221-230
- [4] Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDES. UAI Press
- [5] Suprojo, Ferdi. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 8 (4): 367-371
- [6] Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>